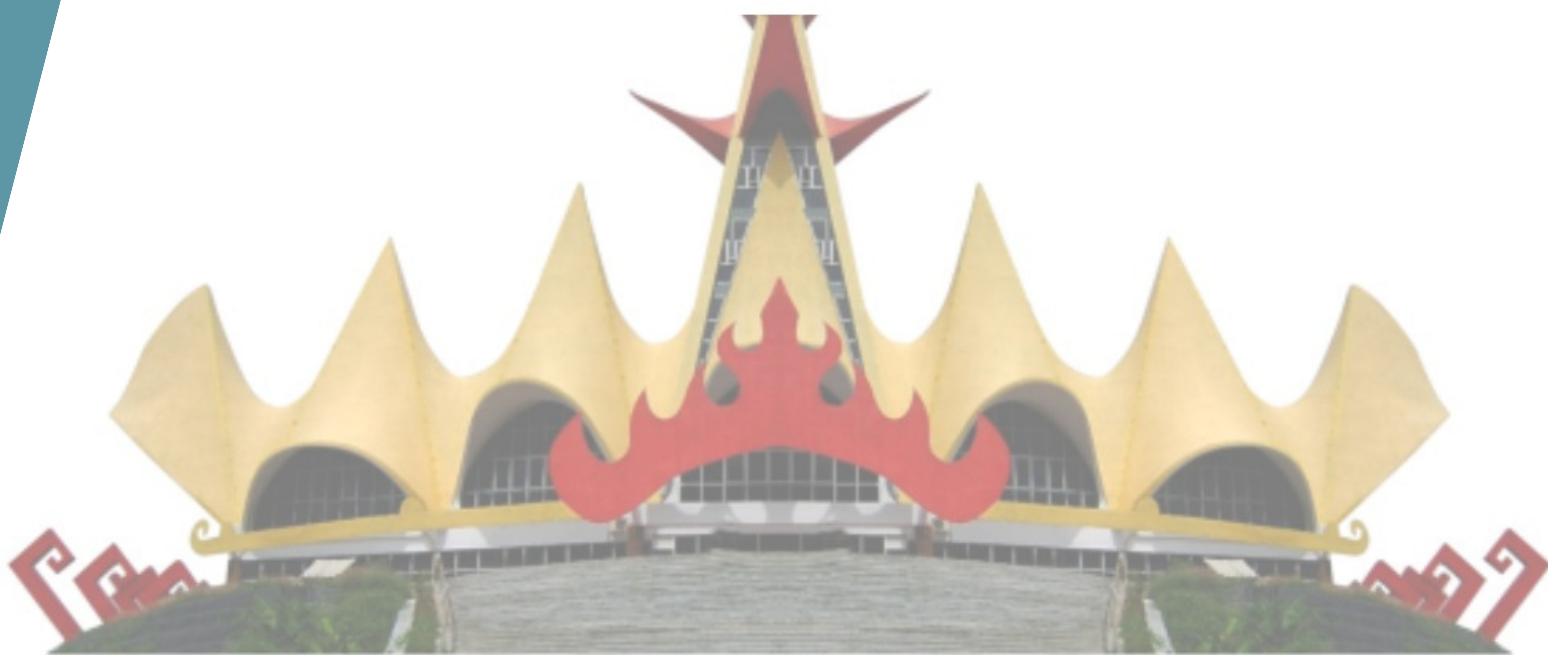




EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2023



**Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Lampung**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) triwulan II Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung telah disusun dan dilaksanakan selama kurun waktu Januari s.d. Juni Tahun 2023 memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan kedalam program dan kegiatan Tahun 2023.

Diharapkan Evaluasi Hasil Rencana Kerja (RENJA) triwulan II Tahun 2023 ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi yang berimplementasi kepada tugas pokok dan fungsi lembaga secara optimal, serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada kurun waktu Januari s.d. Juni 2023.

Bandar Lampung, Juli 2023

KEPALA BADAN



Drs. M. FIRSADA, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
A.	LATAR BELAKANG I.1
B.	DASAR HUKUM I.2
C.	MAKSUD DAN TUJUAN I.3
D.	RUANG LINGKUP I.3
E.	SISTEMATIKA PENULISAN I.4
BAB II	PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA II.1
	RENJA DENGAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT
	DAERAH
BAB III	CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
A.	REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA III.1
	KEPALA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II
B.	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, III.2
	KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN
	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
	TRIWULAN II TAHUN 2023
BAB IV	HAMBATAN DAN KENDALA
A.	HAMBATAN DAN KENDALA IV.1
B.	UPAYA PEMECAHAN MASALAH IV.1
BAB V	PENUTUP
A.	KESIMPULAN V.1
B.	REKOMENDASI V.1

DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel II.1	Kesesuaian Renja 2023 terhadap Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	II.1
Tabel III.1	Capaian Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2023	III.1
Tabel III.2	Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan II Tahun 2023	III.2
Tabel V.1	Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	V.1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Secara nasional, pemerintah merupakan induk dalam proses pembangunan yang harus membuat pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 20 tahun, sebagai capaian pembangunan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh stakeholder yang terlibat pada skala nasional.

Selanjutnya, RPJP tersebut diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 5 tahun yang menjadi pedoman pemerintah daerah untuk mendukung RPJMN tersebut dalam wadah RPJP dan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk mengaplikasikan visi dan misi rencana pembangunan daerah.

Penjabaran RPJMD dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program antara RPJMD dengan RKPD harus konsisten, sehingga dapat tercapai sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan Tolok ukur Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Daerah, maka sesuai dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2023.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2023 merupakan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2023 adalah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung periode triwulan II Tahun Anggaran 2023 dan tolok ukur pencapaian target Sasaran Pembangunan Badan Kesbangpol Provinsi Lampung periode triwulan II Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung periode Januari s.d Juni (triwulan II) tahun 2023 antara lain:

1. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dan telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Tahun 2023;
3. Sebagai upaya monitoring dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan periode bulan Januari s.d Juni (triwulan II) tahun 2023 guna menganalisa pencapaian target kinerja dan keuangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung meliputi sasaran strategis, dan indikator target kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019-2024.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penyusunan evaluasi renja triwulan II tahun 2023

BAB II. PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

BAB III. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang realisasi capaian indikator kinerja utama kepala perangkat daerah triwulan II dan realisasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran rencana kerja perangkat daerah triwulan II tahun 2023.

BAB IV. HAMBATAN DAN KENDALA

Menguraikan Hambatan dan Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan kurun waktu Januari s.d Juni (triwulan II) Tahun 2023 serta upaya pemecahan masalah

BAB V. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Lampung triwulan II Tahun 2023.

BAB II

PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA
DENGAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kesesuaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pendanaan, Indikator dan Target Kinerja Antara Dokumen Renja Tahun 2023 dengan Renstra OPD Tahun 2019–2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II. 1
Kesesuaian Renja 2023 terhadap Perubahan Renstra Badan
Kesbangpol Provinsi LampungTahun 2019-2024

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU RENSTRA		PAGU RENJA	
			2023		2023	
			TARGET	Rp	TARGET	Rp
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		persen		21.707.217.930		21.707.217.930
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		persen		21.707.217.930		21.707.217.930
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	persen	75	17.734.860.630	75	17.734.860.630
KEGIATAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	persen	95	265.936.600	92,5	265.936.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	dokumen	5	121.420.000	5	121.420.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	jumlah dokumen RKA- SKPD tepat waktu	dokumen	4	26.618.000	4	26.618.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	14	20.000.000	4	20.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	26.618.000	4	26.618.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	20.000.000	4	20.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	26.618.000	12	26.618.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	14	24.662.600	14	24.662.600
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi keuangan	persen	92.5	15.244.037.030	90	15.244.037.030
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	orang/ bulan	51	6.694.530.030	51	6.694.530.030
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah badan/lembaga penerima hibah uang	Dokumen	39	8.496.000.000	39	8.496.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi	dokumen	12	26.896.000	12	26.896.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	jumlah dokumen keuangan	laporan	18	26.611.000	18	26.611.000
KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset	persen	94	42.060.000	92	42.060.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen	4	14.020.000	4	14.020.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	laporan	4	14.020.000		14.020.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang dan pengelolaan aset milik daerah	laporan	8	14.020.000	8	14.020.000
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi kepegawaian	persen	85	71.400.000	80	71.400.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	5	45.000.000	5	45.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	120	13.200.000	120	13.200.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	orang/hari/kegiatan	120	13.200.000	120	13.200.000
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase layanan administrasi umum	persen	85	1.347.350.000	80	1.347.350.000
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	12	17.489.000	12	17.489.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	36	414.606.000	36	414.606.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	12	9.600.000	12	9.600.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12	33.450.000	12	33.450.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	12	27.500.000	12	27.500.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	paket	12	120.936.000	12	120.936.000
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi	laporan	60	723.769.000	60	723.769.000
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	80	455.390.000	77,5	455.390.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	216.590.000	12	216.590.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	12	238.800.000	12	238.800.000
KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	persen	65	308.687.000	65	308.687.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	7	203.687.000	7	203.687.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	8	75.000.000	8	75.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	100	30.000.000		30.000.000
2.	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	persen	30	1.152.978.000	25	1.152.978.000
		Prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	persen	30	1.152.978.000	25	1.152.978.000
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	12	44.647.000	12	44.647.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	12	44.647.000	24	44.647.000
	Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	2740	953.884.000	2740	953.884.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	300	105.600.000	300	105.600.000

3.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	laporan	15	4.200.000	15	4.200.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	persen	30	176.516.300	30	176.516.300
	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persen	30	176.516.300	30	176.516.300
4.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	500	150.516.300	500	150.516.300
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	15	26.000.000	15	26.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	persen	30	674.793.000	25	674.793.000
	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	persen	30	674.793.000	25	674.793.000

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	1400	652.293.000	1400	652.293.000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	laporan	15	22.500.000	15	22.500.000
5.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	persen	30	1.422.735.000	30	1.422.735.000
	KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persen	30	1.422.735.000	25	1.422.735.000
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	dokumen	4	120.000.000	4	120.000.000

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	1000	474.512.000	950	474.512.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	1200	430.348.000	1200	430.348.000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lapaoran Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	15	6.500.000	15	6.500.000
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	dokumen	4	391.375.000	4	391.375.000
6.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di provinsi lampung	persen	30	545.335.000	72,75	545.335.000

KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK ETIKA BUDAYA POLITIK PENINGKATAN DEMOKRASI FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	persen	30	545.335.000	25	545.335.000
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	6	9.400.000	6	9.400.000
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen	12	15.140.000	12	15.140.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	orang	450	201.056.000	450	201.056.000

Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	1250	311.739.000	1230	311.739.000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	laporan	15	8.000.000	15	8.000.000

BAB III

CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

A. REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung, Target capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1 yang memberikan informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaian/realisasi yang telah dicapai selama tahun 2023.

Tabel III.1

Capaian Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Triwulan II Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Sat	TAHUN 2023		CAPAIAN
				Target	Realisasi Triwulan II	
1	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	%	87,5	100	114,29
2	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	%	72,75	74,09	101,84

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja utama yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, berdasarkan hasil review indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung triwulan II tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan indikator kinerja utama prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung ditetapkan sebesar 87,5%, realisasi kinerja sampai dengan bulan Juni 2023 (Triwulan II) tercapai sebesar

100%, hal ini ditandai dengan tidak terjadinya potensi konflik menjadi peristiwa konflik di Provinsi Lampung.

2. Penetapan indikator kinerja utama prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih ditetapkan pertahun sebesar 72,75% realisasi kinerja sampai dengan akhir bulan Juni 2023 sebesar 74,09%, hal ini disebabkan realisasi kinerja masih menggunakan data penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu pada tahun 2020.

B. REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023

Dalam penyelenggaraan tugasnya membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tahun 2023 melaksanakan 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan capaian kinerja periode bulan Januari s.d Juni (triwulan II) tahun 2023 sebesar 31,42% dan realisasi keuangan sebesar 8,21% dengan rincian sesuai tabel III.2 sebagai berikut:

Evaluasi Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023 Triwulan 2

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=4-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	75	67.755.747.112	90,4	14.628.772.113	75	179.262.631.537,15	10	13.692.854.395	13,33	7,64	10	28.321.626.508	13,33	41,80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	97,5	905.697.400	85,71	124.974.600	95	102.275.200	40,1	39.936.600	40,10	39,05	40,1	164.911.200	41,13	18,21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	20	470.292.000	5	23.396.700	5	15.194.000	2	5.806.900	40,00	38,22	7	29.203.600	35,00	6,21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	16	102.924.200	4	21.182.300	4	15.376.700	2	6.834.900	50,00	44,45	6	28.017.200	37,50	27,22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	42	60.000.000	4	17.811.800	4	15.407.400	2	6.715.100	50,00	43,58	6	24.526.900	14,29	40,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	8	58.559.600			4	14.290.600	2	4.886.400	50,00	34,19	2	4.886.400	25,00	8,34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	12	60.000.000	4	19.618.500	4	13.962.800	2	5.248.900	50,00	37,59	6	24.867.400	50,00	41,45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	58.559.600	12	22.874.000	12	14.994.900	4	4.536.400	33,33	30,25	16	27.410.400	66,67	46,81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	56	95.362.000	14	20.091.300	14	13.048.800	6	5.908.000	42,86	45,28	20	25.999.300	35,71	27,26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan	95	58.417.921.756	100	12.891.444.635	92,5	176.661.950.197,15	15	13.101.961.687	15,00	7,42	15	25.993.406.322	15,79	44,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	204	26.620.784.356	51	6.062.271.735	51	6.763.201.837,15	51	3.296.707.387	100,00	48,74	102	9.358.979.122	50,00	35,16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	156	31.590.374.400	39	6.769.369.600	39	169.854.158.360	2	9.793.339.200	5,13	5,77	41	16.562.708.800	26,28	52,43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	48	104.000.000	12	23.395.300	12	22.414.000	4	7.108.100	33,33	31,71	16	30.503.400	33,33	29,33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	72	102.763.000	18	22.459.600	18	22.176.000	4	4.807.000	22,22	21,68	22	27.266.600	30,56	26,53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase keselarasan laporan dan pengelola aset	96	127.512.000	100	20.095.000	92,5	35.962.000	25	8.825.000	25,00	24,54	25	28.920.000	26,04	22,68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12	42.504.000	4	9.061.000	4	24.278.000	1	5.848.900	25,00	24,09	5	14.909.900	41,67	35,08	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lapaoran Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32	54.188.000	8	11.034.000	8	11.684.000	2	2.976.100	25,00	25,47	10	14.010.100	31,25	25,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi kepegawaian	90	191.620.000	79,56	14.729.000	85	54.400.000	5	1.400.000	5,00	2,57	5	16.129.000	5,56	8,42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	99.000.000			5	27.000.000									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	240	26.400.000			154	15.400.000									Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	602	66.220.000	144	14.729.000	120	12.000.000	14	1.400.000	11,67	11,67	158	16.129.000	26,25	24,36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi umum	90	5.207.340.416	83,33	1.051.030.471	85	1.481.862.140	22	300.730.199	22,00	20,29	22	1.351.760.670	24,44	25,96	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Evaluasi Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023 Triwulan 2

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=a-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8.1.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	48	67.617.400	12	14.574.200	12	11.243.200	3	3.123.800	25,00	27,78	15	17.698.000	31,25	26,17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144	1.440.866.600	36	342.075.000	43	350.052.000					36	342.075.000	25,00	23,74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	48	39.193.000	12	8.000.000	12	8.000.000	3	1.600.000	25,00	20,00	15	9.600.000	31,25	24,49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	48	111.478.216	12	27.529.400	12	20.176.940	3	5.458.800	25,00	27,05	15	32.988.200	31,25	29,59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan /material yang disediakan	48	517.619.200	4	29.988.000	12	108.356.000	1	5.774.000	8,33	5,33	5	35.762.000	10,42	6,91	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.6.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	48	135.350.000	6	9.215.000	12	32.400.000	1	6.235.000	8,33	19,24	7	15.450.000	14,58	11,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	240	2.895.216.000	60	619.648.871	60	951.634.000	18	278.538.599	30,00	29,27	78	898.187.470	32,50	31,02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	82,5	1.774.678.840	87,5	316.978.529	80	525.952.000	27	140.901.793	27,00	26,79	27	457.880.322	32,73	25,80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	827.318.840	9	115.311.829	12	282.452.000	2	41.901.793	16,67	14,84	11	157.213.622	22,92	19,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	947.360.000	12	201.666.700	12	243.500.000	4	99.000.000	33,33	40,66	16	300.666.700	33,33	31,74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	67,5	1.130.976.700	96,67	209.519.878	65	400.230.000	25	99.099.116	25,00	24,76	25	308.618.994	37,04	27,29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	28	798.082.700	7	158.369.878	6	197.770.000	2	93.009.116	33,33	47,03	9	251.378.994	32,14	31,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	32	220.534.000	8	30.940.000	8	181.900.000					8	30.940.000	25,00	14,03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.1.9.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	400	112.360.000	90	20.210.000	80	20.560.000	25	6.090.000	31,25	29,62	115	26.300.000	28,75	23,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	30	4.249.194.700	100	936.105.600	30	1.940.350.600	12	679.482.100	40,00	35,02	12	1.615.587.700	40,00	38,02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	prosentase pelaksanaan pemantapan ideologi dan karakter kebangsaan	30	4.249.194.700	100	936.105.600	30	1.940.350.600	12	679.482.100	12,00	35,02	12	1.615.587.700	40,00	38,02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.2.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	45	143.247.500	12	22.166.700	3	30.141.000	2	19.708.000	66,67	65,39	14	41.874.700	31,11	29,23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.2.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.480	2.003.156.000			1425	1.420.167.800	475	458.038.100	33,33	32,25	475	458.038.100	8,67	22,87	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.2.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.280	1.804.308.700	2.740	800.621.700	420	268.893.800	320	201.736.000	76,19	75,02	3.060	1.002.357.700	57,95	55,55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Evaluasi Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023 Triwulan 2

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5=a-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
8.1.2.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	57	18.206.300	15	26.490.000	15	221.148.000					15	26.490.000	26,32	145,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	30	2.155.125.900	79,55	434.671.400	30	1.092.819.000	5	167.036.530	16,67	15,28	5	601.707.930	16,67	27,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Prosentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	30	2.155.125.900	79,55	434.671.400	30	1.092.819.000	15,45	167.036.530	15,45	15,28	15,45	601.707.930	51,50	27,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.3.1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Dae	22	36.327.600	6	7.807.400	3	12.470.000	1	1.785.000	33,33	14,31	7	9.592.400	31,82	26,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.3.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45	56.374.000	9	8.680.600	3	10.575.900	1	2.115.180	33,33	20,00	10	10.795.780	22,22	19,15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.3.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan S	1.780	789.373.400	450	165.520.000	3830	702.930.300	665	110.679.900	17,36	15,75	1.115	276.199.900	62,64	34,99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.3.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan	5.530	1.242.650.900	1.100	246.463.400	500	93.935.400	115	21.287.600	23,00	22,66	1.215	267.751.000	21,97	21,55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Evaluasi Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023 Triwulan 2

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=a-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8.1.3.1.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemanta	60	30.400.000	5	6.200.000	15	272.907.400	2	31.168.850	13,33	11,42	7	37.368.850	11,67	122,92	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	30	703.301.300	90,81	168.547.000	30	258.433.000	20	162.059.700	66,67	62,71	20	330.606.700	66,67	47,01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30	703.601.300	90,81	168.547.000	30	258.433.000	25	162.059.700	25,00	62,71	25	330.606.700	83,33	46,99	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.4.1.3	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.055	606.001.300	470	129.373.000	525	220.433.000	315	124.059.700	60,00	56,28	785	253.432.700	38,20	41,82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.4.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pendataan dan Pelaporan Ormas	60	97.600.000	13	39.174.000	2	38.000.000	2	38.000.000	100,00	100,00	15	77.174.000	25,00	79,07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	30	2.345.375.000	88,72	979.761.900	30	1.170.394.600	7	246.614.800	23,33	21,07	7	1.226.376.700	23,33	52,29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Prosentase Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	30	2.345.375.000	88,72	979.761.900	30	1.170.394.600	15	246.614.800	15,00	21,07	15	1.226.376.700	50,00	52,29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.5.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5.615	2.254.275.000	1.363	580.145.100	1365	1.131.241.600	276	226.493.100	20,22	20,02	1.639	806.638.200	29,19	35,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.5.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60	91.100.000	10	68.016.800	15	39.153.000	8	20.121.700	53,33	51,39	18	88.138.500	30,00	96,75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Provinsi Lampung	30	4.433.739.200	83,25	1.173.851.600	30	824.509.000	8	206.652.400	26,67	25,06	8	1.380.504.000	26,67	31,14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Prosentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	30	4.433.739.200	83,25	1.173.851.600	30	824.509.000	15	206.652.400	15,00	25,06	15	1.380.504.000	50,00	31,14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Evaluasi Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023 Triwulan 2

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=1-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8.1.6.1.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	18	340.000.000	2	100.000.000	2	108.304.500					2	100.000.000	11,11	29,41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.6.1.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penangan	3.700	1.544.278.800	950	395.827.400	880	365.605.800	278	111.015.800	31,59	30,36	1.228	506.843.200	33,19	32,82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.6.1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konf	5.000	1.417.297.200	195	383.225.600	350	80.944.200	136	31.369.100	38,86	38,75	331	414.594.700	6,62	29,25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.6.1.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Lapaoran Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta P	60	23.267.200	15	30.623.600	15	32.116.500	3	6.404.000	20,00	19,94	18	37.027.600	30,00	159,14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.1.6.1.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	12	1.108.896.000	4	264.175.000	2	237.538.000	1	57.863.500	50,00	24,36	5	322.038.500	41,67	29,04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Rata-rata capaian kinerja											31,42	8,21						
Peringkat											Sangat Rendah							

BAB IV

HAMBATAN DAN KENDALA

A. HAMBATAN DAN KENDALA

Tidak ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan periode bulan Januari s.d Juni 2023 (triwulan II)

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan periode bulan Januari s.d Juni 2023 (triwulan II) sudah sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disepakati dan ditetapkan.

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dalam kurun waktu Triwulan II Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d Juni 2023) realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel V.1

Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

No	URAIAN	PAGU DANA Rp.	REALISASI Rp.	SALDO Rp.
1	2	3	4	5
I	BELANJA	184.549.137.737,15	15.154.699.925,00	169.394.437.812,15
I	BELANJA OPERASI	184.199.085.737,15	15.154.699.925,00	169.044.385.812,15
	Belanja Pegawai	6.763.201.837,15	3.296.707.387,00	3.466.494.450,15
	Belanja Barang dan Jasa	7.581.725.540,00	2.064.653.338,00	5.517.072.202,00
	Belanja Hibah	169.854.158.360,00	9.793.339.200,00	160.060.819.160,00
II	BELANJA MODAL	350.052.000,00	0,00	350.052.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	350.052.000,00	0,00	350.052.000,00

B. REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja dan realisasi keuangan, diharapkan pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan tetap berpedoman pada Rencana Aksi tahun 2023 yang telah disepakati dan ditetapkan.

Bandar Lampung, Juli 2023

KEPALA BADAN



Drs. M. FIRSADA, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001